

**SKRIPSI**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN FOTOGRAFI DENGAN TANDA AIR ATAU  
WATERMARK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.19 TAHUN 2002 TENTANG  
HAK CIPTA**

**OLEH:**

**Dedy Dermawan Armadi**

**B111 10 360**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2014**

## **HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN FOTOGRAFI DENGAN TANDA AIR ATAU  
WATERMARK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.19 TAHUN 2002 TENTANG  
HAK CIPTA**

**OLEH:**

**Dedy Dermawan Armadi**

**B111 10 360**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam Bagian  
Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN FOTOGRAFI DENGAN TANDA AIR ATAU *WATERMARK* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**DEDY DERMAWAN ARMADI**

**B 111 10 360**

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**

  
Prof. Dr. Ahmad Miru S.H, M.H  
NIP. 19610607 198601 1 003

**Sekretaris**

  
Dr. Nurfaidah Said S.H, M.H, M.Si  
NIP. 19600621 198601 2 001



**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
Prof. Dr. Ir. Abbar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dedy Dermawan Armadi

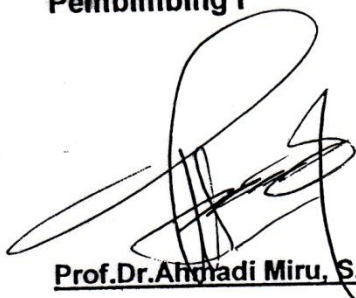
Nim : B 111 10 360

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau *WaterMark* berdasarkan Undang-undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Makassar,..... 2014

**Pembimbing I**



Prof. Dr. Angadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

**Pembimbing II**



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si

NIP. 19600621 198601 2 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nam : **DEDY DERMAWAN ARMADI**

No. Pokok : B111 10 360

B a g i a n : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air (*Water Mark*) Berdasarkan UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2014



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

Fotografi adalah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang sebagai salah satu produk dari Kekayaan Intelektual dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan diaturnya fotografi sebagai produk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Negara tidak serta merta memberi jaminan terhadap perlindungan hak cipta atas karya fotografi.

Salah satu permasalahan utama dalam perlindungan karya cipta fotografi adalah status hukum terhadap metode-metode baru dalam dunia fotografi, salah satunya adalah pemberian tanda air atau *watermark* pada ciptaan fotografi yang dikembangkan oleh pencipta untuk melindungi ciptaannya. Kemudian masalah penentuan pencipta dalam penciptaan karya fotografi yang menggunakan tanda air atau *watermark* dalam ciptaan fotografi yang sumber ciptaannya berasal dari berbagai sumber, dan kemudian mengalami perubahan berupa proses olah digital yang dapat menghasilkan ciptaan fotografi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian normatif yaitu, penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara.

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa ciptaan fotografi yang menggunakan tanda air atau *watermark* dalam ciptaan fotografi diakui oleh Undang-undang selama dalam proses pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU hak cipta, sehingga kemudian Ciptaan fotografi yang menggunakan tanda air atau *watermark* mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang terutama perlindungan hukum terhadap hak-hak para pencipta.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN FOTOGRAFI DENGAN TANDA AIR ATAU *WATERMAR* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”. Shalawat dan Salam tak lupa penulis haturkan atas Nabi besar Muhammad Shallallahu’Alaih Wassalam, Pribadi luar biasa yang telah menyelamatkan umat manusia menuju nikmatnya dunia yg penuh kebaikan dibawah panji Islam.

Terima kasih tak terhingga untuk Ayahanda saya tercinta Drs.Jumading beserta Ibunda saya yang tercinta Hj.Armiati S.Pd atas segala pengorbanan yang beliau lakukan demi anaknya. Terima Kasih atas segala doa yang beliau panjatkan guna kesuksesan anaknya. Terima kasih atas segala pelajaran berharga yang telah beliau berikan kepada anaknya. Terima kasih untuk saudaraku tercinta Juswandy Armadi atas berbagai bantuan dan dorongannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di jenjang Sarjana (S1) dibidang Ilmu Hukum dan semoga skripsi dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, baik para mahasiswa,pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya yang menaruh perhatian pada masalah-masalah hak cipta terutama hak cipta atas karya fotografi

Pada kesempatan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan Jajarannya
2. Ibu Prof.Dr.farida Patitingi S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya
3. Bapak Prof.Dr.Anwar Borrahima S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Sri Susyanti S.H., M.H selaku Sekretaris bagian Hukum Keperdataan
4. Para Dosen Hukum Keperdataan beserta Dosen-dosen lainnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof.Dr.Ahmadi Miru S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap waktu dan tenaganya guna membantu penulis menyelesaikan skripsi ini



6. Ibu Dr.Nurfaidah Said S.H.,M.H,M.Si selaku Pembimbing II yang telah member banyak masukan, dan dukungan positif guna penyelesaian skripsi penulis
7. Ibu Prof.Dr.Badriyah Rifai S.H., Ibu Dr. Oky D Burhamzah S.H.,M.H, Bapak Dr.Hasbir Paserangi S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah member banyak masukan guna penyelesaian skripsi penulis
8. Bapak Idris Buyung S.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberi motivasi dan bantuan moral kepada penulis
9. Oara Staf Akademik,Staf kemahasiswaan dan Staf Kepustakaan yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
- 10.Narasumber penelitian, Ibu Nosema S.H serta staf kantor Wilayah Hukum dan HAM Prov.Sulawesi-Selatan
- 11.Narasumber penelitian, Bapak Achmad Yasir Baeda, Kakanda Ahmad Alia, Kakanda Andi Iqbal, Septian Bagus yang telah membantu penulis mengumpulkan data dalam proses penyelesaian skripsi ini
- 12.Keluarga Besar Saya yang telah banyak memberi semangat selamaproses penyelesaian Skripsi ini
- 13.Sahabat terbaik saya, keluarga besar JNK, Junaedi Azis S.H, Saifullah Anwar S.H, Djumhanuddin Hilolo S.H., Nur Iman S.H, Dima Adinsa S.H, Sumange S.H, Muh.Sahlan

Ramadhan S.H, Asrul S.H, Nadly Afandi S.E, Dio Alifiansyah, Emi Humairah Hamzah S.H, Bani P Hasanuddin S.H, Triya Wulandari S.H, Nurul Fitriani Salim S.H, Nabilah Zoraya S.H, Syifa Fauziah S.Km, atas segala bantuan, semangat dan doa kepada penulis

14. Teman-teman angkatan 2010 LEGITIMASI

15. Teman-teman KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 85,

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala doa, dukungan, motivasi dan bantuannya selama proses penyusunan penyelesaian skripsi ini

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada semua pihak yang telah membantu saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan tersebut dengan nikmat rahmat dan hidayah nya. Amiin

Akhir Kata, Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Makassar Oktober 2014

Penulis

Dedy Dermawan Armadi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hak Cipta.....	10
B. Fotografi.....	36
C. Tanda Air atau <i>WaterMark</i> .....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Status Hukum Ciptaan Fotografi dengan Tanda air atau <i>WaterMark</i> .....	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air atau <i>WaterMark</i> .....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Indonesia merupakan Negara yang sangat luas dan berbentuk kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan dihuni oleh masyarakat dengan berbagai kultur budaya, agama, ras, suku, dan bahasa yang berbeda satu sama lainnya. Budaya, seni dan keanekaragaman dari masyarakat ini adalah salah satu sumber kekayaan terutama kekayaan intelektual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang merupakan potensi luar biasa yang patut dilindungi oleh Negara.

Ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan sastra yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangatlah erat kaitannya dengan konsep Hak atas Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI, ataupun HaKI.<sup>1</sup> Di periode zaman sekarang, di mana dunia dituntut menuju era modernitas dan globalisasi, potensi perkembangan seni, budaya, ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan yang signifikan yang dapat dijadikan sebagai media untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan personal bahkan Negara sekalipun.

Hak atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan dasar dari istilah *Intellectual Property Right* yaitu

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.<sup>2</sup>Hak kekayaan intelektual sendiri terdiri dari tiga kata dasar yaitu, Hak,Kekayaan dan Intelektual.Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki dialihkan,maupun dibeli.Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan, lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma, atau hukum-hukum yang berlaku.

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.<sup>3</sup>

Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pemegang Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi,tentu saja dalam

---

<sup>2</sup>Muhammad Firmansyah, Tata Cara mengurus HaKI, VisiMedia, Jakarta, 2008, Hlm.7

<sup>3</sup> Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustiis, Yogyakarta, 2010

batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta merupakan bidang penting hak atas kekayaan intelektual yang mengatur berbagai ragam karya cipta seperti, karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, dan film atau sinematografi.<sup>4</sup> Karya tersebut diciptakan oleh penciptanya baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apa saja jenis ciptaan yang dilindungi, dan siapa yang dimaksud dengan pencipta adalah salah satu masalah yang dinilai perlu memperoleh pengaturan. *Article 7* konvensi Bern menetapkan beberapa varian jangka waktu perlindungan, termasuk ditetapkan dengan selama hidup pencipta dan berlangsung terus selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia dan kemudian diratifikasi oleh Negara Indonesia dan dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan tentang hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta, diatur bahwa perlindungan suatu karya diberikan selama 50 (lima puluh) tahun ,namun perlu dipahami bahwa usia hak cipta tidak sama dengan usia ekonomis dari ciptaan tersebut. Sebagai contoh, usia karya cipta dibidang perangkat lunak adalah 50 (lima puluh) tahun, sedangkan usia ekonomisnya umumnya kurang dari 5 tahun, karena adanya perkembangan yang cepat dibidang perangkat lunak dan komputer.

---

<sup>4</sup> WIPO *Intellectual Property HandBook*, WIPO Publication No.489 (E), 2001, hlm.43

Ada beberapa pendekatan dalam menentukan nilai karya cipta :<sup>5</sup>

1. Pendekatan biaya, adalah total biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan karya cipta dijadikan patokan sebagai nilai karya cipta tersebut.
2. Pendekatan pasar, adalah nilai pasar yang dapat diprediksi berdasarkan data permintaan dalam jangka waktu tertentu dipakai sebagai patokan untuk menentukan nilai dari karya tersebut.
3. Pendekatan penerimaan, adalah data penerimaan yang telah diperoleh selama kurun waktu tertentu dijadikan sebagai patokan untuk memberikan nilai dari suatu karya cipta.

Hukum mengakui, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Artinya selesai diwujudkan dalam material form (*fixation*) sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan.<sup>6</sup>

*Article 2* angka (2) Konvensi Bern mengatur :secara jelas bahwa akhir penyelesaian ciptaan atau waktu fiksasi menjadi titik tolak lahirnya hak. Seiring dengan hal itu, dalam *Article 9 (2)* persetujuan TRIPs mengatur bahwa hak cipta menganut prinsip hanya melindungi ekspresi

---

<sup>5</sup> Muhammad Ahkam Subroto, *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Indeks, Jakarta, 2008, hlm.38

<sup>6</sup>.Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta,2011, hlm 12



dan bukan ide atau inspirasi, prosedur, metode pengoperasian, atau konsep matematik.

Dengan demikian bahwa hak cipta barulah memperoleh perlindungan hukum pada saat ciptaan dari ide tau gagasan diwujudkan dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya sebagai ciptaan yang lahir dari kemampuan, kretifitas dan keahlian dari penciptanya. Jadi perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak diberikan jika karya cipta tersebut hanya berbentuk ide atau gagasan yang tinggal dalam pikiran penciptanya saja. Namun ciptaan tersebut haruslah berwujud nyata dari ide atau gagasan tersebut sehingga dapat dibaca, didengar, atau dilihat sesuai dengan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Hak Cipta

Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah fotografi, yang diatur di Pasal 12 ayat (1) huruf J tentang jenis ciptaan yang dilindungi oleh Negara, Secara eksplisit mengenai pengaturan tentang Fotografi diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Hak Cipta tentang hak cipta atas potret

Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya atau tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun.<sup>7</sup> Potret adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sebagai salah satu produk dari kekayaan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (7)

intelektual, maka dari itu, apabila seseorang ingin mempergunakan suatu foto, maka harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Pelanggaran hak cipta fotografi jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak tanpa izin dari pencipta yang memiliki hak eksklusif atas ciptaanya.

Hak cipta timbul bersamaan dengan lahirnya karya cipta. Namun hak cipta barulah memperoleh perlindungan hukum pada saat ciptaan dari ide atau gagasan diwujudkan dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya sebagai ciptaan yang lahir dari kemampuan, kreatifitas, dan keahlian dari penciptanya.

Seiring perkembangan dunia menuju era modernitas, dunia fotografi konvensional (menggunakan film) kini mulai bergeser menuju fotografi digital, fotografi tidak lagi menggunakan media film atau klise sebagai media penyimpanan data, melainkan sudah menggunakan media penyimpanan data digital, artinya dalam menyimpan data tidak lagi membutuhkan media nyata, melainkan dapat dilakukan melalui media digital salah satunya menggunakan *memory card* (kartu memori). Sehingga potensi dalam pelanggaran hak cipta baik dalam hal memperbanyak, ataupun penyebarluasan ciptaan fotografi tanpa izin dari pencipta terbuka lebar.

Selain dalam hal media penyimpanan yang berpotensi menyebabkan pelanggaran hak cipta, saat ini mengikuti perkembangan

teknologi yang pesat juga turut menciptakan metode-metode baru dalam dunia fotografi, salah satunya adalah teknologi dalam hal olah digital pada hasil foto guna meningkatkan nilai estetika pada ciptaan fotografi. Olah digital yang dilakukan umumnya berasal dari *software* komputer yang khusus memiliki fungsi untuk melakukan olahan digital pada foto yang pada akhirnya menghasilkan foto yang berbeda dari foto aslinya, biasanya akan mengalami perubahan tekstur, warna, kecerahan, kontras, dan ketajaman hasil foto. Ciptaan fotografi yang telah melalui proses olah digital seringkali diberikan tanda air atau *watermark* sebagai penanda bahwa ciptaan fotografi tersebut telah melalui proses olah digital. Dikalangan fotografer sendiri, tanda air atau *watermark* dianggap sebagai penanda bahwa ciptaan fotografi tersebut adalah karya ciptaan mereka.

Dalam perkembangannya saat ini, tanda air atau *watermark* sendiri dianggap sebagai simbol dari hak cipta yang dianggap memiliki kekuatan hukum. Selain daripada itu, tidak adanya batasan yang jelas mengenai pemberian tanda air atau *watermark* ini, apakah diberikan oleh pencipta atau diberikan oleh pihak yang telah melakukan proses olah digital pada ciptaan fotografi tersebut. Sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa dan pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya mengenai pengaturan hukum terhadap tanda air atau *watermark*, apakah ciptaan yang memiliki tanda air atau *watermark* dan tidak memiliki tanda air atau *watermark* dari hasil olah digital ini memiliki kekuatan hukum yang sama dalam melindungi kepentingan pencipta.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum tanda air atau *watermark* pada ciptaan fotografi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum tanda air atau *watermark* pada ciptaan fotografi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum dari tanda air *watermark* pada ciptaan fotografi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dari tanda air atau *watermark* pada ciptaan fotografi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- A. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta pada khususnya.
- B. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengenai Hak atas kekayaan Intelektual, dibidang hak Cipta terutama Hak Cipta atas potret.

## 2. Manfaat Praktis

- A. Bagi penulis, diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan penalaran, membentuk pola pikir dinamis,sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang permasalahan mengenai hak cipta.
- B. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dalam perlindungan hak cipta.
- C. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Cipta

Pengaturan mengenai Hak Cipta sudah dikenal sejak dahulu dan diatur dalam hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912. Di tahun 1982 kemudian disahkan Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti *Auteurswet* 1912. Undang-Undang ini pun kemudian diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku sampai saat ini. Demikian perjalanan aturan tentang Hak Cipta dalam bidang keilmuan di Indonesia dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang.<sup>8</sup>

Hak Cipta diketahui berasal dari Negara yang menganut sistem hukum *Common Law* yakni, *Copyright*. Sedangkan di daratan Eropa seperti di Jerman, Hak Cipta disebut dengan *urheberrecht* dan di Perancis disebut *droit d'auteur*. Di Inggris sendiri Hak Cipta disebut dengan *Copyright* yang pembentukannya bertujuan untuk melindungi kepentingan penerbit, bukan kepentingan pencipta. Seiring dengan perkembangan hukum dan

---

<sup>8</sup> Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal.61.

teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta yang diperluas tidak hanya mencakup bidang buku, tapi juga dibidang drama, musik, seni, fotografi dan lain-lain.<sup>9</sup>

Karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan suatu hak yang kemudian disebut dengan hak cipta (*copyright*).<sup>10</sup> Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. Dinamakan Hukum HKI ini, karena meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan bersifat ekonomi dan moral.<sup>11</sup>

Istilah Hak Cipta sendiri pertama kali dicetuskan oleh St. Moh. Syah pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah Hak mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang tersebut memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup hanya hak dari para pengarang saja. yang berhubungan dengan karang-

---

<sup>9</sup> Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.1.

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.187.

<sup>11</sup> Edi Damian *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung 2005, Hlm.32.

mengarang saja. Sedangkan hak cipta lebih luas, dan termasuk karang-mengarang.<sup>12</sup>

Sebagai perbandingan, beberapa definisi Hak Cipta menurut :

- *Auteurswet* 1912 dalam Pasal 1 mengatur bahwa “Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V mengatur bahwa “hak cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2002 Pasal 1 angka (1) mengatur bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang

---

<sup>12</sup> H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 58



timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *Auteurswet* 1912 maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan dalam Undang-undang Hak Cipta menggunakan istilah “hak eksklusif atau hak khusus”. Yang dimaksudkan dalam “hak eksklusif atau hak khusus” adalah pencipta merupakan satu-satunya pihak yang dapat memanfaatkan hak tersebut. Dengan kata lain tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.

Perkataan “tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hak pencipta saja yang dapat mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang kemudian disebut dengan hak eksklusif/hak khusus. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik.<sup>13</sup>

Ada dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu :<sup>14</sup>

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau

---

<sup>13</sup> H.OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.59

<sup>14</sup> M.Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta, Erlangga, 1982, hlm.11.

nama samarannya, dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta dalam kaitannya ciptaan yang mendapatkan hak cipta yakni :<sup>15</sup>

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini kemudian diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai *sub-principles*, yaitu :

- Suatu ciptaan harus memiliki keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika, ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain. Itu berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan ataupun suatu cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
- Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta berarti

---

<sup>15</sup>Edi Damian *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung 2005, hlm. 99-106.

tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang terwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap berada pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) keduanya dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*). Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja, Selain hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi secara konseptual dan tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap hal-hal berikut :<sup>16</sup>

1. Semua ciptaan warga Negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia.
2. Semua ciptaan bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia.
3. Semua ciptaan bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Negeranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara republik Indonesia.
  - Negeranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta

Hak cipta mempunyai fungsi yang sifatnya individu (*private*) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu, sebagai alat untuk memajukan masyarakat , sehingga pelaksanaan hak cipta, untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih

---

<sup>16</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara mengurus HaKI, VisiMedia, Jakarta 2008, hlm.11-12.*

besar. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta, disamping diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas individu-individu dalam masyarakat, juga diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat dari praktik pelaksanaan hak cipta yang menyimpang.<sup>17</sup>

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial ( tidak berwujud nyata), sehingga Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena :

- Pewarisan
- Hibah
- Wasiat
- Perjanjian tertulis, atau
- Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

---

<sup>17</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2010, hlm. 49

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan tersebut. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas itu. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta dan diatur dalam Pasal 12 yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup 12 jenis ciptaan, yaitu :

1. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (layout), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal

denga *thyphological arrangement*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain, format hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah, yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.<sup>18</sup>

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis, dengan itu. Yang dimaksud dengan “ciptaan lain yang sejenis” adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Lagu atau musik dalam Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair, atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan “utuh” adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.
5. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang

---

<sup>18</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.54-55.

dimaksud “gambar” meliputi : motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Yang dimaksud “kolase” adalah komposisi artistic yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain,kertas,kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Seni terapan berupa kerajinan tangan digolongkan suatu ciptaan jika tujuan pembuatannya bukan untuk produksi massal.

7. Arsitektur, yang dimaksud dengan “arsitektur” antara lain : seni gambar bangunan, seni gambar minitur, dan seni gambar maket bangunan.
8. Peta, yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Seni batik. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaannya tersendiri.Karya-karya seperti itu memperolehperlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif, atau gambar maupun komposisi warnanya.Yang juga digolongkan dalam seni batik adalah karya tradisional lainnya yang terdapat diberbagai daerah seperti seni songket, seni ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan di Indonesia.



10. Fotografi, berisi gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya atau tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun
11. Sinematografi. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi : film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar, di televisi, atau di media lainnya. Karya serupa dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi, atau perorangan.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. “Bunga rampai” meliputi : ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan. *Database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan karya intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaanya dimasukkan dalam *database* tersebut. Yang dimaksud dengan “pengalihwujudan” adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan,

cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.

Di samping itu, perlindungan juga diberikan pada semua ciptaan yang tidak diumumkan atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu kesatuan bentuk yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya cipta tersebut. Ciptaan yang belum diumumkan sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap sebagai ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap suatu ciptaan berlaku secara otomatis sejak pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum diumumkan dan didaftarkan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa tidak ada hak cipta atas :

- a) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
- b) Peraturan perundang-undangan
- c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e) Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Yang dimaksud dengan “keputusan badan-badan sejenis lain” misalnya keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk

keputusan-keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan dan mahkamah pelayaran. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah adanya jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperbanyak data tersebut secara gratis, tanpa perlu terikat perjanjian lisensi dan kewajiban membayar royalty

Pelaksanaan hak cipta juga mengenal adanya pembatasan-pembatasan, artinya ada jenis-jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat jika penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%.<sup>19</sup>

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial, termasuk untuk kegiatan social. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan dari

---

<sup>19</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, VisiMedia, Jakarta, 2008, hlm.15

pencipta, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah :

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber jenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, yang dimaksud “berita aktual” adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta mengatur beberapa macam perbuatan lain yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta asalkan sumbernya harus disebutkan dengan jelas, yaitu :

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk :
  - Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  - Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
4. Perbanyakan suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf *braille* guna keperluan para tunanetra, kecuali jika bersifat komersial.
5. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan

7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pemerintah berhak melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, menimbulkan masalah ras dan kesukuan, dapat menimbulkan gangguan terhadap pertahanan keamanan Negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum, dan ketertiban masyarakat

Undang-Undang Hak Cipta mengenal adanya kategori pencipta yang timbul karena proses penciptaan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga Negara, atau lembaga pemerintah, badan hukum milik Negara, maupun badan hukum milik swasta.<sup>20</sup> Pencipta adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas, dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya

---

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.50

seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Definisi pencipta seperti yang dituliskan di atas memberi penjelasan yang sangat jelas mengenai seorang pencipta. Melalui definisi tersebut dapat diketahui untuk dapat disebut sebagai seorang pencipta, seseorang harus mempunyai kemampuan dan *skill* yang memungkinkan seseorang atau beberapa orang dianggap sebagai pencipta.<sup>22</sup>

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :

1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI.
2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

---

<sup>21</sup> Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan hukum hak cipta perangkat lunak program computer dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Makassar, 2011, hlm.34

<sup>22</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 75.

Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar serta apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.<sup>23</sup> Berdasarkan ketentuan ini, sebuah hak cipta yang sudah didaftarkan bisa saja dibatalkan jika ditemukan bukti adanya karya cipta sejenis milik orang lain yang telah dipublikasikan lebih dulu meskipun belum didaftarkan.

Pengertian ciptaan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa, “ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.”

Adapun hubungan antara pencipta dan ciptaan dapat dinilai dari :

#### 1. Kriteria Orisinal dan Refleksi Personal Pencipta

Kriteria orisinal sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya derajat kualitas keaslian yang akurat. Prinsipnya jelas bahwa suatu ciptaan tidak boleh sama dengan ciptaan lainnya. Ciptaan orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri. Artinya berdasarkan

---

<sup>23</sup> Pasal 5 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta



kreatifitas pencipta yang sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptaannya. Kreatifitas menjadi faktor penentu yang memberi ciri atau refleksi pribadi penciptanya.

## 2. Kualifikasi sebagai Ciptaan.

Undang-Undang Hak Cipta memberi batasan pengertian ciptaan secara kategoris, yaitu hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan, yang dihasilkan dari pengorbanan waktu, tenaga, dan keterampilan, biaya serta pemikiran intelektual. Seluruh kontribusi ini memberi ciri yang bersifat khas dalam suatu ciptaan. Kualifikasi hanya membedakan status seluruh karya kedalam kelompok ciptaan dan *non*-ciptaan. Yang dimaksud dalam "*non*-ciptaan" adalah benda-benda yang tersedia di alam raya yang bukan buatan manusia. Selain itu, yang juga tidak termasuk dalam kualifikasi ciptaan adalah jenis-jenis karya intelektual yang menjadi objek paten, desain industri, dan bidang HKI lainnya.<sup>24</sup>

Pasal 1 angka (1) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak ekonomi dan hak moral.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 52-59

<sup>25</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Sebuah kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 88

#### A. Hak ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaanya yang terdiri dari hak untuk :

- a. Memproduksi karya dalam segala bentuk
- b. Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik.
- c. Menyewakan perbanyakan karya.
- d. Membuat terjemahan atau adaptasi.
- e. Mengumumkan karya kepada publik.

Menurut Djumhana, ada lebih banyak lagi hak yang melekat pada jenis Hak ekonomi dalam hak cipta, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Hak reproduksi (*reproduction right*) yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. Undang-Undang hak cipta mengenal istilah hak perbanyakan.
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*) yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain.
- c. Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan, atau penyewaan. Dalam Undang-undang hak cipta hak ini dikenal dengan hak mengumumkan.

---

<sup>26</sup> AbdulKadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.20-21

- d. Hak pertunjukan (*performance right*) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusi, dramawa, seniman, pragawati.
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam Undang-Undang hak cipta , hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televise yang bersifat komersial.
- g. *Droit de suite*, yaitu hak tambahan yang sifatnya kebendaan.yaitu sifat yang mengikuti kemanapun benda nya berada.
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan diperpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

#### B. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Ada dua jenis hak moral, yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Eral Global,Sebuah kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 89*

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*). Jika karya seorang pencipta diperbanyak, diumumkan, atau, dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut.
- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Tidak dapat dipisahkan dari pribadi pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas, yang hanya dimiliki oleh pencipta. Termasuk dalam hak moral adalah hal-hal berikut :<sup>28</sup>

- a. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaanya.
- b. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- c. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.22

Simorangkir, mengatur bahwa 3 (tiga) dasar hak moral, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Hak mengumukan (*the right of publication*)
- b. Hak paternitas (*the right of paternity*)
- c. Hak integritas (*the right of integrity*)

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Hak Ciptamengatur bahwa, hak cipta atas ciptaan :

- a. Buku, pamphlet, dan seluruh hasil karya tulis lain.
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi.
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
- d. Seni batik
- e. Lagu atau music dengan atau tanpa teks.
- f. Arsitektur.
- g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain.
- h. Alat peraga.
- i. Peta.
- j. Terjemahan, tafsiran, saduran, dan bunga rampai.

Berlaku selama hidup pencipta, dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomidan Hak Kekayaan Intelektual, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001, hlm.22*

Dalam ayat (2) Pasal ini, juga mengatur bahwa, untuk ciptaan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Kemudian di Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta mengatur bahwa, hak cipta atas ciptaan :

- a. Program komputer
- b. Sinematografi.
- c. Fotografi
- d. Database
- e. Karya hasil pengalihwujudan.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan, pada ayat (2) mengatur bahwa, hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ayat (3) mengatur bahwa hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, mengatur bahwa hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu.
- b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

Ayat (2) mengatur bahwa, dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dari berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa, jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas, ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama, atau nama samara penciptanya.

Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa, tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi :

- a. Selama 50 (lima puluh) tahun
- b. Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

## **B.Fotografi**

Fotografi yang dalam bahasa inggris disebut *photography* berasal dari bahasa yunani kuno, yaitu, “*photos*” yang berarti cahaya, dan “*grafos*” yang berarti melukis/menulis, jadi secara terminologi, fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya.<sup>30</sup> Sebagai istilah umum fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya.

Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan, dalam hal ini disebut lensa.

---

<sup>30</sup> Wikipedia.org.id



Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa lightmeter. Setelah mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (*ISO Speed*), diafragma (*Aperture*), dan kecepatan rana (*speed*). Kombinasi antara ISO, Diafragma & Speed disebut sebagai pajanan (*exposure*). Secara filosofis, fotografi juga memiliki banyak definisi, entah dipandang dari segi subjektif, maupun obyektif.<sup>31</sup>

Secara singkat mengenai perkembangan fotografi di dunia, penemuan fotografi dimulai pada abad 5 SM, oleh seorang pria di Cina yang bernama Mo Ti, dengan melakukan pengamatan terhadap sebuah fenomena alam, yaitu apabila pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang, maka di bagian dalam ruang itu akan terpantulkan obyek di luar ruangan secara terbalik, melalui lubang tadi.<sup>32</sup>

Tahun 1558, pria bernama Batissta Delta Porta menemukan prinsip kerja kamera yang dipublikasikan melalui buku tentang kamera obscura yang dibuat berdasarkan prinsip penemuan Da Vinci. Tahun 1824, melalui berbagai penyempurnaan dari berbagai orang diseluruh Negara, akhirnya pria Perancis bernama Joseph Nicopher Niepce, seorang lithograph berhasil membuat gambar permanen pertama yang disebut foto, melalui proses yang disebut "*heliogravure*" dengan menggunakan sejenis aspal

---

<sup>31</sup> Rangga Aditiawan, Ferren Bianca, Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis, Dunia Komputer, Jakarta, 2011, Hlm. 9

<sup>32</sup> [WWW.wikipedia.org.id/wiki.fotografi](http://WWW.wikipedia.org.id/wiki.fotografi) diakses pada hari Selasa 17 Desember 2013 Pkl.13.00

sebagai bahan kimia dasarnya. 7 januari 1839 pengumuman resmi penemuan teknologi fotografi diumumkan ke seluruh dunia oleh Perancis. Penemu fotografi dengan plat logam, Louis Jacques Mande Daguerre, yang merupakan partner kerja Joseph Nicopher Niepce dalam melakukan percobaan foto,sebelum akhirnya meninggal ditahun 1824.<sup>33</sup>

Kemudian prinsip dasar fotografi modern ditemukan oleh William Henry Fox Talbot, seorang ilmuwan Inggris yang menemukan cara membuat foto dengan metode *calotype*. Prinsip dasar inilah yang kemudian terus dikembangkan oleh penemu lainnya sehingga melahirkan kerangka pemikiran tentang fotografi beserta alat dan media untuk menuangkan ciptaan dalam bentuk gambar,yang sekarang lazim disebut dengan kamera.<sup>34</sup>

Fotografi merupakan salah satu bidang ciptaan yang sangat luas,karena banyaknya jenis-jenis fotografi yang telah ditemukan sampai saat ini. Beberapa jenis fotografi tersebut adalah .<sup>35</sup>

- a. Fotografi jurnalistik, adalah spesialisasi khusus untuk mencari dan menampilkan foto yang bernilai berita
- b. Fotografi pernikahan, spesialisasi fotografi yang mengkhususkan pada pengabadian momen-momen pernikahan.

---

<sup>33</sup> [WWW.wikipedia.org.id/wiki.fotografi](http://www.wikipedia.org.id/wiki.fotografi) diakses pada hari selasa 17 desmber 2013 Pkl.13.00

<sup>34</sup> Dennis P. Curtin *A Short Courses Book The Text Book Of Digital Photography*.USA.2007

<sup>35</sup> <http://otodidakfotografi.blogspot.com/2012/09/jenis-jenis-fotografi-bagian-1.html> diakses pada tanggal 17 desember 2013 pkl.12,05 WITA

- c. Fotografi arsitektur, adalah spesialisasi fotografi dibidang pemotretan bangunan baik dibidang eksterior maupun interior.
- d. Fotografi sains, adalah spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah dan penelitian.
- e. Fotografi aerial, adalah fotografi dengan spesialisasi pengambilan gambar melalui udara,
- f. Fotografi astro, adalah fotografi dengan penekanan pemotretan obyek luar angkasa.
- g. Fotografi model, adalah spesialisasi pemotretan dengan obyek manusia sebagai model.
- h. Fotografi komersial, adalah spesialisasi fotografi yang dibuat guna kepentingan komersial
- i. Glamour fotografi, adalah spesialisasi fotografi yang menekankan pada pengambilan obyek yang menekankan pada kurva dan bayangan.
- j. Fotografi pemandangan, adalah spesialisasi fotografi yang menjadikan pemandangan alam sebagai obyek foto.
- k. Fotografi seni rupa, adalah spesialisasi fotografi yang menekankan pada produksi foto dengan tujuan murni estetika atau seni.
- L. Fotografi perjalanan, adalah jenis fotografi yang melibatkan dokumentasi pemandangan suatu daerah, orang, adat istiadat, sejarah, maupun budaya.

- m. Fotografi malam, adalah jenis fotografi yang pengambilan obyek gambar dilakukan saat senja, ataupun keadaan pada malam hari
- n. Fotografi balistik, adalah jenis fotografi yang berhubungan dengan pengambilan gambar peluru yang ditembakkan dan menembus target tembakan.
- o. Fotografi hitam-putih, adalah jenis fotografi lama yang menekankan pengambilan gambar hanya berdasarkan 2 warna saja, hitam dan putih.
- p. Fotografi peperangan, adalah jenis fotografi yang terkonsentrasi pada pengambilan gambar di situasi perang.
- q. Fotografi busana, adalah jenis fotografi yang berkonsentrasi pada pengambilan gambar suatu busana atau aksesoris.

Di era modern sekarang dikenal 3 jenis kamera yang dibuat dengan prinsip modern dalam pengambilan gambar manual maupun digital, yaitu :<sup>36</sup>

- a. Kamera saku (*digital pocket camera*), adalah jenis kamera fotografi yang mudah dibawa kemanapun, dengan bentuk penyimpanan data digital dan pengambilan gambar dengan ukuran kecil.
- b. Kamera SLR (*single lense reflex*) adalah jenis kamera fotografi yang masih menggunakan film atau klise sebagai media penyimpanan dan penangkap gambar secara manual.

---

<sup>36</sup> Robert Berdan PDF File : *Digital Photography Basics For Beginners*

- c. Kamera Digital SLR adalah jenis kamera yang digunakan untuk kelas profesional yang membutuhkan gambar dengan resolusi tinggi dan menggunakan sensor penangkap gerak otomatis.

### **C. Tanda air atau *watermark***

Konsep atau ide awal dari *watermarking* telah ada sejak tahun 1990an, namun baru populer di tahun 1993 dan diperkenalkan oleh A.Z Tirkel. Digital watermarking didasarkan pada ilmu stenografi yaitu ilmu yang mengkaji tentang penyembunyian data.

*Digital image watermarking* atau pemberian citra gambar pada obyek visual adalah teknik pemberian informasi tertentu kedalam citra visual. Informasi yang disisipkan inilah kemudian disebut *watermark* atau tanda air.

Secara garis besar, pemberian *watermark* berfungsi untuk menyisipkan informasi pada produk digital (citra, audio, video, teks) dengan maksud :

- a. Memberikan perlindungan hak cipta atau *copyright*
- b. *Fingerprinting*
- c. Otentikasi
- d. Menyediakan cara untuk validasi data.

Dalam bidang fotografi, tanda air atau *watermark* dianggap sebagai sidik digital atau stempel digital dari pemilik yang sah atas produk multimedia dalam hal ini adalah ciptaan fotografi.

Adapun jenis-jenis *watermarking* atau pemberian tanda air didasarkan pada empat jenis secara garis besar, yaitu :

- a. *Image watermarking*
- b. *Video watermarking*
- c. *Audio watermarking*
- d. *Text watermarking*

Terkhusus pada citra digital dalam hal ini adalah fotografi yang objeknya berupa citra, dikenal dua jenis *watermark* atau tanda air yang lazim digunakan, yaitu :<sup>37</sup>

- a. *Visible Watermarking* atau Tanda air yang dapat terlihat biasanya digunakan pada foto yang akan dicetak..*watermark* atau tanda air ini dapat terlihat oleh mata manusia, biasanya berupa teks atau logo semi transparan yang ditambahkan pada citra. Sebuah foto diberikan *watermark* dengan memberikan tahun pembuatan dan nama pemilik sebagai tanda hak cipta.
- b. *Invisible Watermarking* atau tanda air yang tak dapat terlihat adalah *watermark* yang disisipkan dengan teknik tertentu sehingga tidak

---

<sup>37</sup> <http://febripuguhpermana.blogspot.com/2012/01/digital-image-watermarking-pengertian.html>  
diakses pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 pkl.13.00 WITA

terlihat oleh mata manusia, mata manusia memiliki keterbatasan dalam membedakan 2 (dua) buah pixel dengan perbedaan yang sangat kecil, hal inilah yang dimanfaatkan dalam penyusupan *watermark* sehingga adanya *watermark* dalam suatu citra digital tidak dapat disadari manusia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu, penelitian terhadap aturan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan prundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara.

#### **B. Lokasi penelitian**

Adapun tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini guna mendapatkan data-data yang diperlukan adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan komunitas Fotografi yang ada di Wilayah Makassar.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu, data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan kepada narasumber dengan kegiatan penelitian ini yaitu, staf bagian Ditjen HKI Kantor Wilayah



Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi-Selatan, Pakar Fotografi dan 5 orang Fotografer di Kota Makassar

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang dilakukan penulis di perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta artikel yang diperoleh dari media elektronik, serta ciptaan fotografi berupa potret yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara yaitu, usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab berkaitan dengan kegiatan penelitian. Wawancara dilakukan kepada narasumber di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi-Selatan, Pakar Fotografi, dan 5 fotografer yang berasal dari berbagai komunitas fotografi di Makassar
2. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, referensi tambahan yang berasal dari internet serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang ditulis.

## **E. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian disajikan dengan teknik deskriptif yaitu, dengan menjelaskan secara cermat karakteristik dari permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang,jelas,dan dapat memberikan data tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Hak Cipta

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Status Hukum Ciptaan Fotografi dengan tanda air atau *watermark*.**

Berkembangnya dunia teknologi kearah yang lebih maju, membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan suatu Negara. Termasuk makin berkembangnya dunia Ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan sastra yang eksistensinya berada ditengah-tengah masyarakat Dunia, termasuk Indonesia, sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia.

Makin majunya dunia teknologi yang mempengaruhi ilmu pengetahuan, seni, budaya dan sastra tentu saja membawa manfaat yang besar terutama dalam hal pengembangan keilmuan, tetapi bersamaan dengan hal itu ikut pula peluang terbukanya berbagai masalah yang menuntut adanya pengaturan-pengaturan, dan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem Negara, termasuk pembaharuan dan pengaturan dalam sistem Hukum.<sup>38</sup>

Ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan sastra merupakan salah satu produk Hak kekayaan Intelektual yang patut dilindungi oleh Negara, sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi-potensi yang dianggap dapat memajukan kehidupan suatu Negara menuju kearah yang lebih

---

<sup>38</sup> Iswi Hariyani, Prosedur mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

biksebagai imbas dari tuntutan menuju era modernitas dalam pergaulan dunia.

Salah satu bagian dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam Hak Kekayaan Intelektual, bukan hanya karena aspek ruang lingkup Hak cipta yang cukup luas, tapi juga, rentannya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi, terutama sebagai akibat makin majunya teknologi yang akhirnya melahirkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta..

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Hak eksklusif sendiri dianggap sebagai hak yang hanya dimiliki oleh pencipta, sehingga hanya pencipta saja yang berhak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memanfaatkan ciptaannya, sehingga bagi pihak lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tersebut, harus mendapat izin terlebih dahulu pada pencipta.

Namun, dalam Praktiknya, walaupun Hak Eksklusif ini diatur dalam Undang-undang, tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta

---

<sup>39</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

pada salah satunya adalah pelanggaran Hak cipta atas ciptaan fotografi baik berupa pemanfaatan tanpa izin, ataupun klaim palsu sebagai pencipta. Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta pada Ciptaan Fotografi tersebut, maka muncul suatu metode untuk melindungi Ciptaan Fotografi yang dikenal dengan Tanda Air atau *WaterMark*, sebagai perwujudan nyata “Hak Eksklusif Pencipta” dalam Ciptaan Fotografinya.

Salah satu Hal yang dilindungi dalam UU Hak Cipta adalah Fotografi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf J, tentang Ciptaan yang dilindungi.

Fotografi sendiri sebagai bagian dalam Hak Cipta, tentu saja juga mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Dahulu, Fotografi hanya memungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan media kamera, dan media penyimpanan berupa roll film, tapi mengikuti perkembangan teknologi yang membawa banyak kemudahan, saat ini memungkinkan untuk membuat ciptaan fotografi tidak hanya dari kamera saja, tapi dari produk teknologi lainnya, media penyimpanannya pun juga mengalami perkembangan, dimulai dari media penyimpanan menggunakan roll film (analog), sampai menggunakan Media penyimpanan berupa Kartu Memori (*memory Card*).

Salah satu metode modern yang digunakan untuk melindungi kepentingan pencipta dalam ciptaan Fotografi adalah Penggunaan Tanda

Air atau *WaterMark* yang dipasang pada hasil ciptaan fotografi seorang pencipta. Penggunaan tanda air atau *WaterMark* ini diharapkan dapat lebih melindungi hak-hak pencipta dan ciptaannya

Berkembangnya teknologi di bidang hak cipta, disatu sisi membawa kemudahan penggunaan, tapi di sisi lain tentu saja membawa dampak negatif, salah satunya adalah potensi pelanggaran hak cipta yang sangat mungkin dilakukan. Dalam bidang fotografi sendiri, pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang lazim di temui adalah penggunaan ciptaan fotografi tanpa izin oleh orang lain, yang akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak pencipta dalam hal ini adalah seorang fotografer. Karena Pelanggaran seperti inilah kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan suatu cara untuk melindungi kepentingan Pencipta agar lebih terjamin, walaupun perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta sudah diatur dalam UU Hak Cipta.

Pemberian tanda Air atau *WaterMark* pada Ciptaan Fotografi ini dianggap salah satu metode terbaik untuk melindungi hak dan kepentingan pencipta, karena dengan jelas mencantumkan nama dari pemilik asli suatu ciptaan fotografi, bukan hanya melindungi hak dan kepentingan pencipta dalam lingkup nasional saja, tapi juga dapat melindungi kepentingan Pencipta dalam Lingkup Internasional.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Achmad Yasir Baeda, Wawancara Pakar Fotografi, Makassar 29 april 2014

Dalam UU Hak Cipta , pengaturan mengenai tanda Air atau *WaterMark* sama sekali belum diatur. Tapi walaupun belum diatur, dalam UU Hak Cipta terdapat pengaturan yang memungkinkan dikenalnya suatu tanda air atau *WaterMark*<sup>41</sup>, artinya adalah Penggunaan Suatu Tanda Air atau *WaterMark* dapat dilakukan pada suatu ciptaan Fotografi.

Pasal 5 ayat (1) Huruf B UU Hak Cipta Mengatur bahwa Kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai seorang pencipta adalah Huruf B Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Berdasarkan Pasal inilah, Tanda Air atau *WaterMark* dianggap memungkinkan untuk dibuat pada Ciptaan Fotografi, walaupun secara Eksplisit dalam UU Hak Cipta sama sekali belum mengatur mengenai Tanda Air atau *WaterMark*.

Pemberian Tanda Air atau *WaterMark* dapat diberikan oleh Pencipta Tunggal saja. Tetapi untuk Pembuatan Ciptaan Fotografi melibatkan 2 (dua) orang atau lebih, pemberian tanda air atau *watermark* tidak serta merta dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja.

Salah satu contohnya adalah Pembuatan Ciptaan Fotografi Oleh pihak kedua berdasarkan Sumber Ciptaan Fotografi milik Pihak Pertama. Dalam hal ini maka dalam kebiasaan Fotografer-fotografer

---

<sup>41</sup> Nosema S.H, Wawancara Kasubag Hukum Umum Kementrian Hukum dan Ham Prov, Sul-Sel, Makassar 5 Mei 2014

adalah pihak kedua dengan itikad baik meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pertama sebagai pemilik hak cipta sumber ciptaan fotografi untuk membuat ciptaan fotografi baru berdasarkan sumber ciptaan fotografi tadi. Kemudian memberikan tanda Air atau *WaterMark* milik pihak kedua.<sup>42</sup>

Pasal 6 UU Hak Cipta mengatur bahwa Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

Berdasarkan aturan diatas, bahwa pemberian tanda air atau *watermark* oleh Pihak Kedua yang membuat Ciptaan Fotografi bersumber dari Ciptaan Fotografi milik Pihak Pertama, sangat memungkinkan untuk dilakukan selama ada izin dari pihak Pertama sebagai bentuk pengakuan dari Hak eksklusif seorang pencipta. Ciptaan Fotografi yang dibuat oleh Pihak kedua yang sumbernya dari Ciptaan fotografi milik Pihak Pertama menurut aturan di atas dianggap sebagai Ciptaan Fotografi baru dengan pemilik hak cipta berada ditangan Pihak kedua, sedangkan sumber Ciptaan Fotografi milik Pihak Pertama tetap diakui sebagai Ciptaan tersendiri.

---

<sup>42</sup> Andi Iqbal, Wawancara Fotografer, Makassar 2 Mei 2014



Pemberian Tanda Air atau *WaterMark* dalam pembuatan ciptaan fotografi berdasarkan sumber ciptaan fotografi pihak lain, dalam penerapannya juga harus memenuhi beberapa syarat :<sup>43</sup>

- Pencantuman Nama Pencipta dari Sumber Ciptaan Fotografi yang digunakan.
- Untuk Keperluan Komersial, harus dibuat Perjanjian secara tertulis untuk tetap menjamin Kepentingan Pencipta dari Sumber Ciptaan Fotografi yang digunakan terutama adalah Hak Ekonomi ( *Economic right* ).

Dengan demikian, bahwa suatu Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* dianggap ada, dan diakui oleh hukum sebagai simbol kepemilikan atas suatu ciptaan fotografi. Walaupun belum diatur dengan jelas dalam UU Hak Cipta, Sedangkan Suatu Ciptaan Fotografi dengan Tanda air atau *watermark* yang penciptanya bersumber dari ciptaan fotografi milik pihak lain, tetap dianggap sebagai ciptaan baru selama, penggunaan sumber ciptaan fotografi telah mendapatkan izin dari pihak yang terkait guna menjamin kepentingan para pihak .

#### **B. Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan tanda air atau *Watermark*.**

Fotografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta, merupakan salah satu jenis ciptaan yang mengalami

---

<sup>43</sup> Andi Anugrah Pawal S.H, Wawancara Fotografer, Makassar 6 mei 2014

perkembangan yang sangat cepat mengikuti perkembangan dunia teknologi, hal itu disebabkan karena keterkaitan fotografi sebagai produk teknologi. Munculnya metode-metode baru dalam dunia fotografi tentu saja menuntut adanya pengaturan-pengaturan baru yang bertujuan untuk mengakomodir perkembangan-perkembangan dalam dunia fotografi yang sangat pesat, sehingga dapat menjamin kepentingan pencipta, baik dari hak moral (*moral rights*) Terlebih lagi dalam menjamin Hak Ekonomi (*economic rights*).

Kemajuan teknologi dibidang fotografi ini, tentu saja semakin memangkas kepentingan pencipta. Perbanyakan, dan pemanfaatan Ciptaan fotografi untuk komersial tanpa sepengetahuan Pencipta, adalah salah satu masalah serius dalam perlindungan ciptaan fotografi. Metode-metode baru kemudian diciptakan untuk lebih meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta atas ciptaan fotografi, salah satunya adalah dengan cara pemberian tanda air atau *watermark* yang dibuat pada tubuh ciptaan fotografi.

Masalah yang timbul kemudian adalah apakah pemberian tanda air atau *watermark* ini diakui dan mendapat perlindungan hukum dari UU Hak Cipta, mengingat UU Hak Cipta belum mengatur secara jelas mengenai Tanda air atau *watermark* ini.

Namun kalangan Fotografer, tanda air atau *watermark* ini adalah metode teraman dalam menjamin ciptaan fotografinya. Hal-hal seperti

inilah yang kemudian membutuhkan sinkronisasi antara kebiasaan masyarakat dan pengaturan hukum yang berlaku untuk dapat menghasilkan produk hukum terbaru yang dapat lebih menjamin kepentingan pencipta, termasuk pencipta atas ciptaan fotografi.

Salah satu upaya adalah adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan pencipta. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun yang tak tertulis. Perlindungan hukum sebagai abstraksi dari fungsi hukum yaitu hukum diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum preventif sendiri adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan dalam kebijaksanaan hal memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan, dan

---

<sup>44</sup>[WWW.Artikata.com/artiperlindunganhukum.html](http://WWW.Artikata.com/artiperlindunganhukum.html)

keadilan (*deskresi*).<sup>45</sup> Sedangkan perlindungan hukum represif sendiri, lebih menuju kepada untuk sarana penyelesaian sengketa.

Perlindungan Hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk

.<sup>46</sup>  
.

- Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu-penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan /atau hasil temuannya.
- Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
- Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan has.
- Mendorong tumbuhnya daya kreatifitas di dalam masyarakat
- Mendorong tumbuhnya sector ekonomi kreatif dan industry kreatif
- Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
- Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

---

<sup>45</sup> [WWW.prasko.com/2011/02/pengertian-perindungan-hukum.html](http://WWW.prasko.com/2011/02/pengertian-perindungan-hukum.html), diakses pada 7 mei 2014  
pkl.23.00 Wita

<sup>46</sup> Iswi Hariyani, SH., M.H *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia, 2010, Yogyakarta  
hal.27

- Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual
- Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa
- Mendorong kemajuan dibidang pendidikan, penelitian dan pengembangan
- Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana dibidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.
- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI
- Merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi
- Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.
- Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HKI
- Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam Negeri (PMDN).

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual seorang individu telah diakomodir dengan lahirnya Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hukum mengakui, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Artinya selesai diwujudkan dalam material form (*fixation*) sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan<sup>47</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ciptaan, salah satunya adalah ciptaan fotografi, harus diwujudkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan suatu ide atau gagasan tanpa perwujudan nyata dianggap sebagai bentuk abstrak saja yang dinilai belum dapat memperoleh perlindungan hukum.

Untuk memperoleh perlindungan hukum, suatu ciptaan fotografi tidak harus didaftarkan, hal ini dikarenakan oleh sifat hak cipta yang sifatnya privasi dan eksklusif yang artinya bahwa, suatu ciptaan fotografi dapat memperoleh perlindungan hukum, walaupun tidak didaftarkan. Suatu Ciptaan fotografi memperoleh perlindungan hukum, setelah menjadi wujud nyata (*material form*) yang memiliki bentuk khas, dan nilai orisinalitas sebagai bentuk hubungan dengan penciptanya.

Ciptaan orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri. Artinya berdasarkan kreatifitas pencipta yang sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan

---

<sup>47</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 12

ciptaannya. Kreativitas menjadi faktor penentu yang memberi ciri atau refleksi pribadi penciptanya.<sup>48</sup>

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini kemudian diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai *sub-principles*, yaitu :<sup>49</sup>

- Suatu ciptaan harus memiliki keaslian (orisinal) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika, ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain. Itu berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan ataupun suatu cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
- Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

---

<sup>48</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 52-59

<sup>49</sup> Edi Damian *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung 2005, hlm. 99-106.

Pasal 1 angka (3) UU Hak Cipta dengan jelas mengatur bahwasuatu ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Dalam hal Ciptaan fotografi yang menggunakan tanda air atau *watermark* dalam perwujudannya tentu saja dianggap sebagai suatu kesatuan ciptaan yang saling mengikat. Sehingga dianggap patut mendapat perlindungan hukum, seperti ciptaan lainnya.<sup>50</sup>

Tetapi untuk ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang bersumber dari ciptaan fotografi milik pihak lain, memerlukan syarat tertentu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang.

Suatu Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang bersumber dari ciptaan fotografi pihak lain, umumnya harus memenuhi syarat tertentu sebagai kebiasaan yang berlaku di dunia fotografi yang dianggap penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Adapun syarat nya adalah :<sup>51</sup>

- Untuk penggunaan sumber ciptaan fotografi berupa foto Pemandangan (*landscape*) harus meminta izin baik tertulis dan/atau tertulis kepada pemilik hak cipta.

---

<sup>50</sup> Nosema S.H, Wawancara Narasumber Kasubag Hukum Umum Kantor. Wilayah Hukum dan HAM Prov.Sul-Sel pada hari senin 5 Mei 2013 Pkl. 10.00

<sup>51</sup> Andi Anugrah Pawal S.H, Wawancara Fotografer, pada hari Selasa tgl 6 mei 2014



- Untuk penggunaan sumber ciptaan fotografi berupa foto manusia (*models/Human Interest*), harus meminta izin kepada pemilik hak cipta dalam hal ini adalah seorang fotografer yang melakukan pemotretan, kemudian meminta izin kepada orang yang berada dalam potret tersebut, baik secara tertulis dan/atau tidak tertulis.
- Untuk kepentingan komersial, penggunaan sumber ciptaan fotografi dari pihak lain, harus dibuat perjanjian tertulis antara para pihak untuk menjamin kepentingan pihak pertama sebagai pencipta dari sumber ciptaan fotografi.
- Untuk kepentingan perbanyakan, pengumuman, dan penyebarluasan suatu ciptaan fotografi yang menggunakan sumber ciptaan fotografi dari pihak lain, dapat dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu dan/atau mencantumkan nama pencipta, dan/atau pihak-pihak yang terlibat dalam sumber ciptaan fotografi yang digunakan.

Suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang bersumber dari ciptaan fotografi pihak lain, dapat mendapatkan perlindungan hukum setelah syarat tersebut dilakukan sebagai upaya dan itikad baik oleh pihak kedua, untuk menjamin hak eksklusif pihak pertama sebagai pemilik hak cipta ciptaan fotografi yang dijadikan sumber untuk menciptakan ciptaan fotografi yang baru.

Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dunia fotografi ini juga secara tidak langsung menjamin kepentingan pencipta yang ciptaan fotografinya dijadikan sumber dalam pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* oleh pihak kedua, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan Hak moral (*moral rights*) yang melekat pada pencipta yang sifatnya pribadi dan kekal menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas, yang hanya dimiliki oleh pencipta. Termasuk dalam hak moral adalah hal-hal berikut :<sup>52</sup>

- a. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaanya.
- b. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- c. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta, atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Sedangkan ayat (3) mengatur bahwa berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama saran pencipta.

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomidan Hak Kekayaan Intelektual, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001, hlm.22*

Pengaturan hukum diatas menjelaskan bahwa persetujuan dari pencipta adalah elemen utama dalam pembuatan ciptaan baru terlebih dalam pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang bersumber dari ciptaan fotografi pihak lain,

Suatu Ciptaan tidak dianggap melanggar Hak cipta, Jika dalam proses perwujudannya tidak melanggar aturan yang berlaku, karena pembuatan ciptaan baru, dianggap bukan mengambil ide dari ciptaan yang sudah ada, melainkan mengikuti ide tersebut untuk pengembangan dan pemutakhiran ciptaan.<sup>53</sup>

Selama pemanfaatan sumber ciptaan fotografi baik komersial maupun non komersial seperti kepentingan pendidikan atau pengembangan, Sumber ciptaan fotografi dari pihak lain bisa saja digunakan, selama ada izin, dan tidak ada unsur mengakui sebagai ciptaan milik pihak kedua.<sup>54</sup>

Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang sumber fotonya menggunakan sumber ciptaan fotografi pihak lain, dapat diakui dalam undang-undang, dan dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah, selama proses pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kepentingan yang wajar pencipta lain sebagai

---

<sup>53</sup> Nosema S.H, Wawancara Narasumber Kasubag Hukum Umum Kantor. Wilayah Hukum dan HAM Prov.Sul-Sel pada hari senin 5 Mei 2013 Pkl. 10.00

<sup>54</sup> Andi Anugrah Pawal S.H, Wawancara Fotografer, pada hari Selasa tgl 6 mei 2014

pihak yang ciptaan fotografinya dijadikan sumber untuk membuat ciptaan fotografi yang baru.

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta fotografi yang pernah terjadi adalah kasus penggunaan ciptaan fotografi oleh pihak Dinas Pariwisata, yang menggunakan Ciptaan fotografi milik salah satu fotografer di Makassar. Ciptaan fotografi tersebut dimasukan dalam spanduk selamat datang dan dipasang di salah satu tempat wisata di kota Makassar. Permasalahannya adalah Pihak Dinas Pariwisata tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum memakai ciptaan fotografi tersebut, sehingga pihak pertama yaitu fotografer merasa dirugikan dan dilanggar hak-haknya atas ciptaan fotografinya. Walaupun penyelesaian sengketa tidak dilalukan melalui jalur pengadilan niaga (litigasi), tetapi melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) yang mempertemukan kedua pihak, diperantarai pihak ketiga. Berdasarkan kesepakatan, bahwa Dinas Pariwisata dianggap telah melanggar kepentingan pencipta dengan memasang ciptaan fotografi milik pencipta tanpa izin dan sepengetahuan pemilik hak cipta, sehingga Pihak Dinas Pariwisata wajib membayar ganti rugi sejumlah uang sesuai kesepakatan, sebagai bentuk kompensasi penggunaan ciptaan fotografi dalam spanduk Dinas Pariwisata, selain itu juga pembayaran ganti rugi juga dianggap sebagai pemulihan hak dari pemilik hak cipta dari ciptaan fotografi yang dilanggar haknya oleh pihak Dinas Pariwisata.

Sebagaimana contoh kasus diatas, menjelaskan bahwa suatu ciptaan, dapat memperoleh perlindungan hukum, selama memiliki bentuk nyata sebagai perwujudan dari ide yang memiliki kekhasan dari penciptanya dan untuk melindungi kepentingan inilah, maka perlindungan hukum dianggap sangat penting guna menjamin kepentingan-kepentingan pencipta.

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap suatu keputusan pemerintah yang belum berbentuk definitif.<sup>55</sup> Dengan alternatif penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Seperti kasus diatas, dimana pihak fotografer merasa dirugikan oleh dinas pariwisata karena penggunaan ciptaan fotografi tanpa izin dan sepengetahuannya. dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan kekeluargaan Contoh kasus diatas juga semakin melengkapi berbagai kasus pelanggaran hak cipta atas ciptaan fotografi yang telah terjadi sebelumnya, sehingga penggunaan tanda air atau *watermark* dianggap perlu dan memiliki kekuatan hukum untuk lebih melindungi kepentingan pemilik hak cipta.

Penggunaan tanda air atau *watermark* sendiri dianggap sebagai salah satu cara untuk pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa pelanggaran hak cipta atas ciptaan fotografi. Selain tanda air atau

---

<sup>55</sup> [www.prasko.com/2011/02/pengertian-perindungan-hukum.html](http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perindungan-hukum.html), diakses pada 7 mei 2014  
pkl.23.00 Wita

*watermark*, ada beberapa pembuktian lainnya yang dapat dilakukan terkait sengketa pelanggaran hak cipta atas ciptaan fotografi, yaitu :<sup>56</sup>

- Besarnya resolusi ciptaan fotografi yang disengketakan, Pihak yang memiliki resolusi ciptaan fotografi yang lebih besar dianggap sebagai pemilik hak cipta.
- Penggunaan File mentah (*Raw File*) adalah hasil Ciptaan fotografi yang diambil langsung dari settingan kamera yang memiliki rekam data ciptaan fotografi, dan yang memiliki File mentah tersebut dianggap sebagai pencipta
- Metadata atau data *EXIF* adalah data pendukung mengenai keterangan jelas dari ciptaan fotografi yang memuat, tanggal pengambilan foto, Komposisi pengambilan foto berupa kecepatan Rana (*shutter speed*), Diafragma, dan *ISO* dari foto tersebut.

Metode pembuktian diatas dapat digunakan untuk dapat mengetahui siapakah pemilik hak cipta yang sebenarnya dari suatu ciptaan fotografi

Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang sumber ciptaan fotografi dari pihak lain juga dapat dibuktikan, tetapi tentu saja dengan catatan bahwa ciptaan fotografi yang bersumber dari pihak lain tersebut, harus memenuhi syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>56</sup> Septian Tomica, Wawancara Narasumber, Selasa 6 Mei 2014

Sehingga ketika terjadi sengketa dengan pihak ketiga, maka akan ada status hukum yang jelas mengenai ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut yang tentu saja melindungi kepentingan pencipta dari pihak pertama dan pihak kedua.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum. Suatu Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* haruslah berwujud nyata sebagai prinsip dasar hak cipta. Selain itu suatu ciptaan fotografi juga dapat didaftarkan pada Ditjen HAKI sebagai bukti hukum bahwa ciptaan fotografi tersebut benar adalah miliknya seperti yang diatur dalam UU Hak Cipta Bab IV Pendaftaran Ciptaan Pasal 35 sampai Pasal 44

Pendaftaran Hak cipta sendiri dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan pemilik hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU hak Cipta “kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah (a) Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal.

Suatu Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang dibuat oleh pencipta tunggal atau Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* dengan sumber ciptaan fotografi dari pihak lain memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf J UU Hak Cipta. Sehingga suatu pelanggaran Hak Cipta terhadap Ciptaan Fotografi dengan tanda air atau

*watermark* baik yang diciptakan oleh pencipta tunggal, ataupun pihak lain memiliki konsekuensi hukum jika dilanggar oleh orang lain.

Pasal 72 angka (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau Pasal 49 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya dan ayat (2) yang mengatur bahwa produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 72 angka (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau



hak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk melindungi kepentingan pencipta atas ciptaan fotografi jenis potret, UU Hak Cipta Mengatur dalam Pasal 72 ayat (5), barangsiapa dengan sengaja pasal 19, 20, atau 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Pengaturan dan sanksi pidana yang besar diharapkan dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, terutama dibidang fotografi yang sangat rentan kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran hak cipta.

Diharapkan seorang pencipta untuk lebih aktif dalam melindungi ciptaannya baik dengan memberikan proteksi lebih seperti memberikan tanda air atau *watermark* pada ciptaan fotografinya atau pun dengan mendaftarkan ciptaannya pada Ditjen HAKI. Selain dari pada itu, diharapkan kepada pihak lain untuk menghormati Hak Eksklusif seorang pencipta berupa Hak Moral (*moral rights*) dan Hak Ekonomi (*economic rights*). Penggunaan suatu ciptaan fotografi milik pihak lain hendaknya dilakukan dengan itikad baik berupa permintaan izin dan melalui perjanjian baik secara tertulis maupun tak tertulis untuk menjamin kepentingan pencipta dan juga untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Status hukum suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* diakui oleh UU Hak Cipta selama dalam pembuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda air atau *watermark* adalah simbol kepemilikan hak pencipta dan sebagai produk kemajuan teknologi untuk lebih melindungi kepentingan pencipta, walaupun belum secara jelas diatur dalam UU Hak Cipta, namun dibolehkan menurut beberapa Pasal yang ada dalam UU Hak Cipta,

2. Pemerintah telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan sebagai produk dari Hak Kekayaan Intelektual seorang Individu, tidak terkecuali pada ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* baik yang diciptakan oleh pencipta tunggal ataupun Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang sumber ciptaannya berasal dari pihak lain, selama dalam pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama jika, ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut juga telah di daftarkan pada Ditjen HAKI.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis, maka adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah :

1. Perlunya sosialisasi dan Edukasi secara luas kepada pihak-pihak terkait dalam Hak Cipta terutama seorang Pencipta yang memiliki kepentingan terutama menyangkut Hak Eksklusif seorang pencipta sebagaimana telah diatur dalam UU Hak Cipta. Mengingat Kemajuan Teknologi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu Ciptaan, terutama dengan munculnya metode-metode baru dalam pembuatan Ciptaan, salah satunya adalah Tanda Air atau *Watermark*

2. Pemerintah dianggap perlu mengadakan tinjauan ulang, dan pembaharuan terhadap UU Hak Cipta, untuk lebih mengakomodir kepentingan pencipta, mengingat kemajuan teknologi yang pesat juga menghasilkan metode-metode baru dalam suatu ciptaan, sehingga dianggap perlu untuk mendapat pengaturan secara jelas dalam UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan pencipta nantinya. Salah satu metode baru pemuatakhiran teknologi dibidang Fotografi adalah Pemberian tanda air atau *watermark* pada tubuh Ciptaan fotografi

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**

Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu

Jln. Bougainville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936

**MAKASSAR 90222**

Makassar, 24 April 2014

Kepada

Nomor : 5689 /P2T-BKPM/19.36P/04/VII/2014

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Prov. Sulsel

di-

Makassar

Berdasarkan surat Dekan FH UNHAS Makassar Nomor : 3342/UN4.6.3PL.02/2014 tanggal 22 April 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : Dedy Dermawan Armadi  
Nomor Pokok : B 111 10 360  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN FOTOGRAFI DENGAN TANDA AIR ATAU WATERMARK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 April s/d 25 Mei 2014

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sekretaris Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**Ir. MUHAMMAD ARIFIN DAUD, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19540404 198503 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Dekan FH UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal



website : [www.p2tprov Sulsel.com](http://www.p2tprov Sulsel.com), email : [p2t\\_prov Sulsel@yahoo.com](mailto:p2t_prov Sulsel@yahoo.com)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**  
JL. SULTAN ALAUDDIN NO :102 TELEPON : 0411 854731 FAX: 871160  
MAKASSAR ( 9 0 2 2 3 )

**SURAT KETERANGAN**

**No. W23-HU.03.02- 17**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **DEDY DERMAWAN ARMADI**  
Nomor Pokok : B111 10 360  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : JL. Perintis Kemerdekaan KM.10, Makassar

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN FOTOGRAFI DENGAN TANDA AIR ATAU *WATERMARK* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”.**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar , 2 Mei 2014

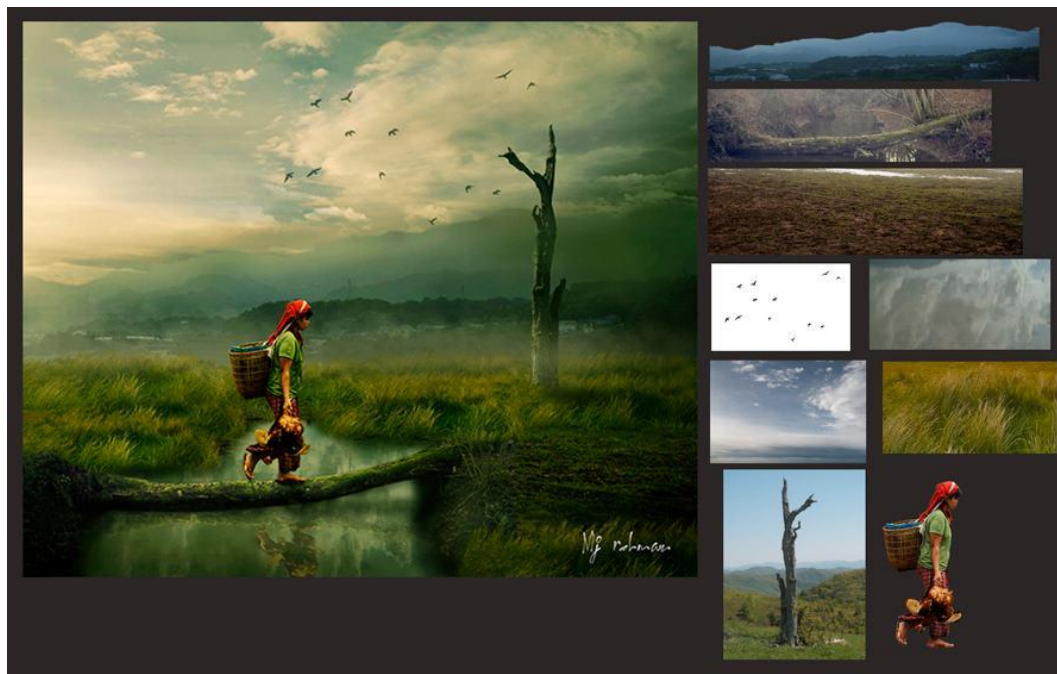
A.n Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,

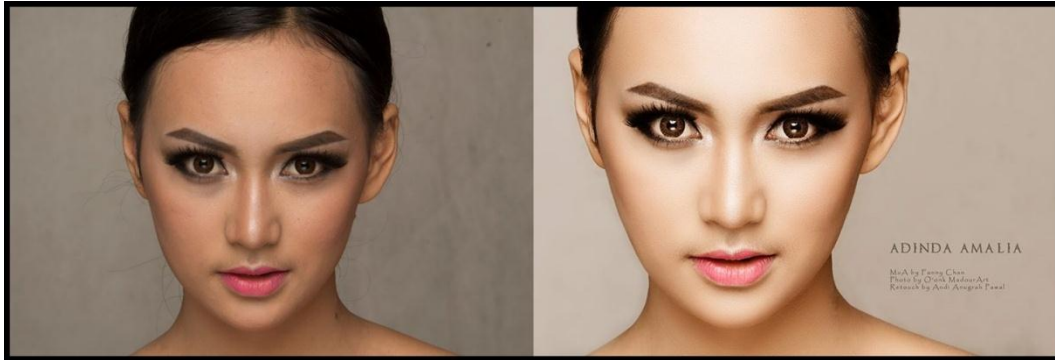


Agus Purwanto  
NIP. 19591006 198703 1 001

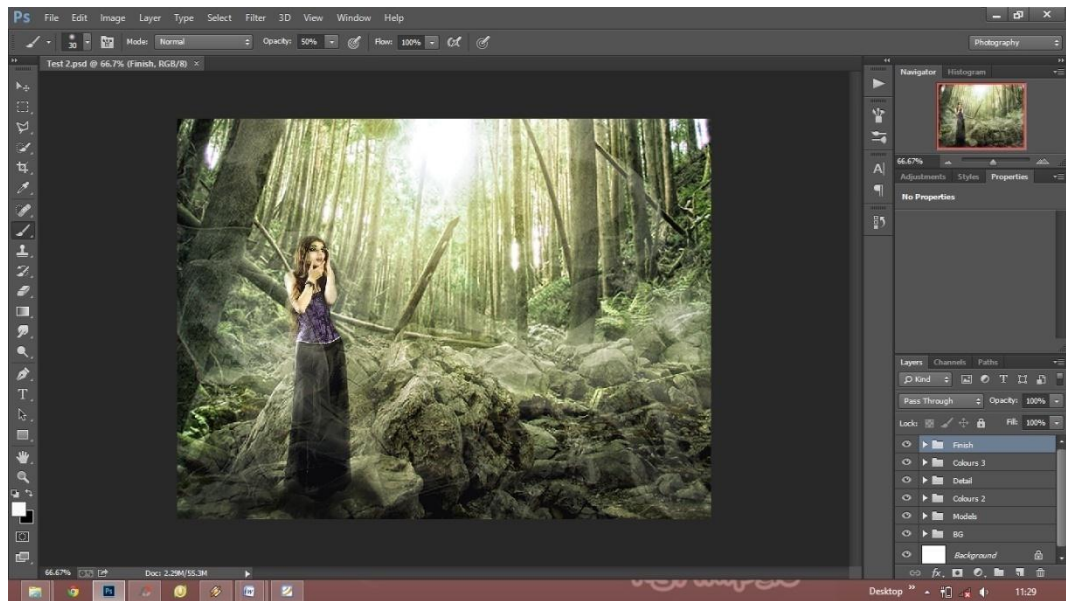


## Foto-Foto Obyek Penelitian









## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV.Yrama Widya, Bandung 2004

Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Dennis P. Curtin *A Short Courses Book The Text Book Of Digital Photography*.USA.2007

Edi Damian *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung 2005

Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta

H.Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HaKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006

H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali PERS, Jakarta, 2011

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Muhammad Ahkam Subroto, *Pengenalan HKI (hak Kekayaan intelektual)*, PT.Macamman Jaya, Jakarta, 2004

Muhammad Firmansyah, *Tata Cara mengurus HaKI*, VisiMedia, Jakarta, 2008

Rangga Aditiawan, *Belajar Fotografi Untuk Hobi dan Bisnis*, Dunia Komputer, Jakarta, 2011

Sudarmanto, *KI dan HKI, Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Kompotindo, Jakarta, 2012

PDF File by Robert Berdan *Digital Photography Basics For Beginners*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

## **WEBSITE ( INFORMASI DIGITAL ) LINKS**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi>

<http://febripuguhpermana.blogspot.com/2012/01/digital-image-watermarking-pengertian.html>

[www.infofotografi.com](http://www.infofotografi.com)

<http://www.fpsi.or.id/>

[www.fotografi.net/forum](http://www.fotografi.net/forum)

[www.Natgeo.id/ Forum National Geographic Indonesia UU Hak Cipta, Etika, dan Fotografi.html](http://www.Natgeo.id/Forum_National_Geographic_Indonesia_UU_Hak_Cipta,_Etika,_dan_Fotografi.html)